

BAB 2

KONDISI SOSIAL-EKONOMI-POLITIK KABUPATEN GARUT PADA TAHUN 1945-1959

2.1 Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Garut Pada Tahun 1945-1959

Indonesia dalam konstelasi nasional pasca proklamasi kemerdekaan sampai berlakunya Demokrasi Terpimpin memiliki keadaan sosial dan ekonomi yang buruk. Beberapa penyebabnya adalah inflasi pada masa perang kemerdekaan terus berlanjut¹, beredarnya mata uang Jepang², dan pengeluaran negara banyak tetapi pemasukan sedikit sehingga kas negara menjadi kosong³. Konstelasi sosial dan ekonomi nasional ini sangat berdampak pada kehidupan di daerah termasuk masyarakat Kabupaten Garut.

Konstelasi sosial dan ekonomi nasional ini sangat berdampak kepada masyarakat Kabupaten Garut yang mayoritas seorang petani, terlebih pemerintah belum membuat sebuah *grand design* pertanian yang bisa menyelesaikan masalah peninggalan kolonial. Aidit dalam sebuah pidato mengatakan bahwa 70% petani masih dalam kedudukan sebagai budak yang hidup melarat dibawah penindasan tuan tanah dan lintah darat⁴. Aidit tidak salah dalam pernyataannya ini, sebab pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1950, Sukarno pernah membuat sebuah terobosan untuk mengubah sistem pertanian melalui pendirian Badan Pendidikan Masyarakat Desa dengan tugas melakukan penyuluhan pertanian. Namun, program ini tidak berjalan disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki negara, sehingga produksi padi mengalami sedikit kenaikan. Langkah yang diambil pemerintah adalah mengimpor beras setiap tahun sampai tahun 1959⁵.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut cenderung lamban salah satu faktornya karena penciptaan nilai tambah dari sektor pertanian sangat kalah dibanding sektor lain seperti industri manufaktur⁶. Pertumbuhan ekonomi

¹ Ricklefs, 475

² Poeponegoro, 1993:172.

³ Djojohadikoemo, 1947:27.

⁴ Aidit, 1955:3.

⁵ Alia, 2009:77.

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), 2010:26.

Kabupaten Garut yang lambat dapat dimengerti dengan penjelasan bahwa pengelolaan pertanian masih sangat tradisional, berbasis teknologi sederhana, serta tidak tergantung pada bahan impor. Wilayah yang terdapat paling banyak pesawahan adalah daerah Garut Tengah dan Garut Utara, seperti Leuwigoong, Kadungora, Leles, Malangbong, Limbangan, Banyuresmi, Cibat, Wanaraja, Bayongbong, dan Karangpawitan. Daerah diluar Garut Utara dan Tengah lebih terkonsentrasi pada tanaman palawija, seperti daerah Samarang dan Cikajang.

Kondisi ekonomi seperti ini dimanfaatkan oleh PKI sebagai isu menjelang pemilihan umum 1955. Menjelang pemilihan umum, PKI membuat tiga tema untuk menyentuh hati rakyat: PKI menyebut dirinya pembela Pancasila, PKI menyebut dirinya dekat dengan Presiden Sukarno, dan PKI menyebut dirinya sebagai pembela bagi kaum tertindas. Pada Kongres ke-V PKI tahun 1954 menyatakan bahwa petani dan buruh harus bisa menjadi pemimpin. PKI berupaya memprovokasi masyarakat untuk menaruh kecurigaan kepada pemerintah dengan isu bahwa program nasionalisasi tanah adalah program terselubung untuk menguasai semua tanah masyarakat agar dikusai hanya oleh negara. PKI juga menjanjikan akan memberikan tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah apabila menang dalam pemilihan umum⁷. PKI dalam proses mendekati petani menggunakan pendekatan Marxisme-Leninisme yang mensejajarkan petani dengan buruh, sehingga muncul dua klasifikasi petani pedesaan dalam pandangannya yaitu petani revolusioner dan petani reaksioner⁸. Petani revolusioner adalah mereka yang memiliki intelektualitas diatas masyarakat umum seperti guru, buruh kebun, serta pekerja industri dan kantor, sedangkan petani reaksioner adalah mereka yang menjadi tuan tanah, petani yang kaya, dan para tengkulak. PKI banyak mengkampanyekan program, ada beberapa program yang dijanjikan PKI kepada masyarakat dan hasilnya cukup meresahkan organisasi Islam di Kabupaten Garut, yaitu PKI berjanji akan membuat kewajiban bagi tuan tanah untuk menurunkan harga sewa tanah, melarang segala bentuk perampasan atas hak tanah dari para petani, serta membeli tanah-tanah partikelir dengan aturan dan harga yang ditentukan oleh

⁷ Aidit, 1955:368.

⁸ Sanit, 1989:148.

pemerintah dan kemudian membagikan tanah-tanah tersebut kepada para petani yang tidak memiliki tanah dan miskin⁹. Organisasi dibawah sayap PKI seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) sangat berperan dalam hal ini. Emosi yang dibangun oleh Aidit terhadap masyarakat berhasil menarik massa masuk ke dalam keanggotaan PKI di beberapa tempat, atau setidaknya menjadi simpatisan. Di Kabupaten Garut kenaikan anggota PKI tidak terlalu drastis karena masih di dominasi oleh organisasi-organisasi Islam seperti PSII, Masyumi, dan NU.

Penghalauan pengaruh PKI di masyarakat Kabupaten Garut tidak terlepas dari peran PSII, Masyumi, dan NU yang sudah memiliki pesantren sebagai basis-basis pengkaderan. Pesantren bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Garut sangat besar. Sampai menjelang tahun 1959-an di seluruh kecamatan sudah terdapat pesantren beserta mesjid agung yang dikelola oleh tim kemakmuran mesjid dari pemerintah daerah. Pesantren tersebut diantaranya adalah Pondok Pesantren Urug pimpinan K.H. Bakri, Pondok Pesantren Darussalam pimpinan K.H. Yusuf Taojiri, Pondok Pesantren Ciasem, Pondok Pesantren An-Nur di Malangbong, Pondok Pesantren Al-Falah Biru pimpinan K.H. Badruzaman, Pondok Pesantren Hidayatul Faizan pimpinan K.H. Siradz, dan Pondok Pesantren Al-Huda pimpinan K.H. Sirad¹⁰.

PKI di Kabupaten Garut banyak diisi oleh orang-orang kaya dari etnis China yang tinggal di Kabupaten Garut. Menjelang tahun 1959 muncul berita di masyarakat Kabupaten Garut bahwa tanah dan sawah milik petani banyak yang telah diambil alih oleh orang-orang komunis China. Berita ini sukses membuat masyarakat Kabupaten Garut menaruh kebencian dan kekhawatiran terhadap orang-orang Komunis China yang berada di Kabupaten Garut. Ternyata berita ini tidak sepenuhnya benar. Tanah dan sawah yang diambil alih oleh komunis China adalah tanah dan sawah petani yang terlilit hutang kepada rentenir¹¹. Ekonomi di Kabupaten Garut sangat dikuasai oleh orang-orang Komunis China.

⁹ Wawancara dengan Hanafi (84 tahun)

¹⁰ Diktat Sejarah Pesantren Urug, 1986:23

¹¹ Zacky, 2013:31.

Mereka tidak hanya menguasai kios-kios yang strategis untuk berjualan, tetapi juga menguasai perdagangan kebutuhan pokok seperti terigu, sayuran, beras, dan lain-lain. Komoditas buah yang dihasilkan oleh petani-petani Cikajang juga dikuasai oleh orang-orang komunis China.

Penguasaan komunis terhadap ekonomi rakyat di Kabupaten Garut sangat membantu menguatkan pengaruhnya di masyarakat. PKI sering melakukan bakti sosial kepada masyarakat dengan tujuan mengambil simpati rakyat dan seakan-akan ingin menjelaskan bahwa suara yang diamanatkan kepada PKI pada pemilu 1955 itu tidak sia-sia. Di daerah Leles, PKI pernah melakukan pembagian pupuk dan beras gratis kepada petani dan masyarakat sebagai antisipasi langkanya pupuk dan mahalnnya harga beras di Kabupaten Garut. Dampak dari gerakan ini adalah naiknya simpatisan PKI di daerah Leles ditunjukkan dengan kenaikan angka orang yang mau ikut berkumpul rapat di rumah tokoh PKI setempat¹².

Darul Islam sama hampir sama dengan PKI yang sejak awal memproklamirkan diri untuk berdirinya sebuah negara Islam juga banyak mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Garut. Darul Islam pada awal berdirinya menarik simpati masyarakat Kabupaten Garut yang mayoritas agama Islam. Terlebih kebanyakan anggota Darul Islam ini adalah mantan anggota PSII, Hizbullah, Sabilillah, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII)¹³. Ruang pergerakan Darul Islam adalah dari hutan ke hutan sejak dinyatakan sebagai organisasi pemberontak oleh Pemerintah Republik Indonesia. Mereka akan turun gunung ketika mencari pasokan bahan makanan dan mencari informasi perkembangan keadaan republik. Namun di beberapa tempat seperti di Leles dan Kadungora, kegiatan turun gunungnya Darul Islam seringkali diwarnai kerusuhan sosial karena yang mereka lakukan adalah sebuah penjarahan yang berakhir pembakaran rumah warga¹⁴. Peristiwa seperti ini dibantah oleh Hidayat (80 tahun) dan Hanafi (84 tahun), menurutnya peristiwa tersebut bukan didalangi oleh Darul Islam. Darul Islam memiliki kekurangan

¹² Wawancara dengan Enah (90 tahun)

¹³ Wawancara dengan Hidayat (80 tahun) dan Hanafi (84 tahun)

¹⁴ *loc.cit.*

pada proses perekrutan sehingga orang-orang dari kelompok lain seperti Pemuda Rakyat, Pemuda Marhaen, dan Pemuda Sosialis bisa masuk dan mengacaukan gerakan¹⁵. Bahkan, setiap selesai turun gunung dan kembali ke barak selalu ada pemeriksaan terhadap barang bawaan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bila terdapat satu barang yang diambil dari masyarakat, maka hukumannya adalah akan menerima pukulan dari satu pleton TNI. Isu Darul Islam dibalik dalang penjarahan dan pembakaran rumah masyarakat sudah merebak, sehingga hasilnya banyak masyarakat yang terkena dampak penjarahan dan pembakaran mengungsi ke Garut Kota yang dinilai lebih dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten dan markas aparat bersenjata¹⁶.

Berdasarkan uraian tentang situasi sosial dan ekonomi menjelang tahun 1959 sangat jelas memengaruhi terhadap munculnya pilihan gerakan yang dilakukan PSII yaitu pendidikan politik sebagai upaya untuk menghalau pengaruh PKI di keanggotaan dan masyarakat secara umum, terutama masyarakat pedesaan. PSII melakukan penerapan berbeda antara pendidikan politik untuk PKI dengan pendidikan politik untuk Darul Islam. Dijelaskan oleh Hanafi (80 tahun) bahwa untuk Darul Islam pelaksanaan pendidikan politik bukan dikhususkan untuk menghalau paham dan gerakannya yang ingin mendirikan negara Islam, tetapi lebih ke bersikap netral dan bisa berubah ke menentang ketika implementasi dari gerakannya mengganggu kedamaian masyarakat.

2.2 Kondisi Politik

Demokrasi Terpimpin mulai berlaku sejak dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan sampai tahun 1965. Masa ini adalah masa dimana Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan kepala negara menjadi pusat pengambil keputusan¹⁷. Kondisi politik di Kabupaten Garut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik nasional yang belum mencapai kestabilan pasca dibubarkannya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955 yang tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai tugasnya. Pasca

¹⁵ *op.cit*

¹⁶ Wawancara dengan H. Dede (86 tahun)

¹⁷ Tim Kemendikbud, 2017:250.

perjanjian Renville sampai tahun 1962, Jawa Barat terutama daerah Timur dilanda pemberontakan Darul Islam. Konflik kerusuhan-kerusuhan sosial sering terjadi terutama di Kabupaten Garut selama tahun 1950-an sampai pada awal 1960-an akibat perpecahan antara golongan komunis dengan Tentara Islam Indonesia¹⁸.

Darul Islam sendiri di proklamirkan pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo di daerah Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakang berdirinya Darul Islam banyak menimbulkan tafsir, ada yang menyatakan sebagai kekecewaan terhadap isi perjanjian Renville dan ada juga yang menyatakan sebagai penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno yang cenderung dekat dengan komunis yang di representasikan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan jauh dari syari'at Islam. Penafsiran yang menyatakan Darul Islam berdiri sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno adalah yang paling mendekati kebenaran berdasarkan surat rahasia yang dikeluarkan oleh Kartosuwiryo kepada Presiden Sukarno pada tanggal 22 Oktober 1950. Surat ini berisi tentang kegembiraan Kartosuwiryo karena Republik Indonesia menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Masuknya Indonesia ke dalam PBB ditafsirkan oleh Kartosuwiryo bahwa politik luar negeri Indonesia tidak boleh netral, tetapi harus berpijak pada Islam atau Komunisme berdasarkan ideologi yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Pandangan Kartosuwiryo tentang hal tersebut adalah Indonesia harus dibawa ke dalam sebuah negara yang berlandaskan Islam dalam mengelola negara dan pemerintahannya¹⁹.

Pada tanggal 17 Februari 1951, Kartosuwiryo menghubungi Presiden Sukarno kembali melalui sepucuk surat rahasia. Surat ini menjelaskan ketegasannya mengajak Sukarno untuk melawan Komunisme di Indonesia. Kartosuwiryo juga menjelaskan bahwa masalah tentang Negara Islam Indonesia (NII) bisa diselesaikan melalui perundingan soal batas negara dan wilayah. Kalau Sukarno bersedia menerima NII sebagai negara, maka Kartosuwiryo berjanji akan membawa NII menjadi teman sehidup semati bagi Republik

¹⁸ Hiroko, 1987:12.

¹⁹ Bohan, 1985:250.

Indonesia. Tetapi jika Presiden Sukarno menolak, Kartosuwiryo akan terus melakukan perjuangan dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap bangsa Indonesia di hadapan Tuhan²⁰.

Pada awal-awal ketika NII diproklamirkan, banyak tokoh muslim di Kabupaten Garut yang bersimpati dan mendukung tanpa ikut bergabung langsung ke dalam Darul Islam, seperti orang-orang Masyumi yang diantaranya adalah K.H. Badruzaman yang pernah diangkat oleh Kartosuwiryo sebagai hakim NII, K.H. Izuddin, dan beberapa pimpinan pesantren kecil di Garut²¹. Posisi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dalam hal ini bersifat dua kaki. Di dalam tubuh PSII ada yang bersimpati dan cenderung mendukung seperti K.H. Solihin dari Ciasem, dan ada juga yang sangat menentang seperti K.H. Yusuf Taojiri dari Pesantren Darussalam Wanaraja. Bahkan, K.H. Yusuf Taudjiri beserta pesantrennya sangat dibenci oleh Darul Islam karena sebanyak dua kali diminta untuk mendukung proklamasi Negara Islam Kartosuwiryo, sebanyak itu pula K.H. Yusuf Taojiri menolaknya²².

Posisi dua kaki PSII membuatnya seakan netral terhadap situasi politik yang berkembang di daerah maupun nasional. Di satu sisi PSII simpati terhadap perjuangan Darul Islam karena memiliki musuh yang sama yaitu komunisme dan kedekatan ideologi yaitu Islam, bahkan tidak sedikit anggota PSII masuk ke dalam pasukan Darul Islam. Di sisi lain PSII juga tidak setuju dengan gagasan yang dikeluarkan oleh Darul Islam yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia dengan cara memberontak kepada pemerintahan yang sah karena ini bertentangan dengan pedoman organisasi yang menyatakan bahwa negara Indonesia harus berlandaskan demokrasi yang bersandar pada kemauan rakyat (ummat) di dalam suatu Majelis Perwakilan Rakyat atau sejenisnya²³. Tafsirnya adalah PSII tidak menolak berdirinya sebuah negara Islam, namun proses menuju menjadi negara Islamnya harus diperhatikan dengan memperhatikan kemauan rakyat yang dilembagakan. PSII pun beranggapan bahwa mendirikan sebuah negara berbentuk Islam itu bukan sebuah kewajiban.

²⁰ Ibid.

²¹ Wawancara dengan Mulyana (84 tahun)

²² Van Dijk, 1983.

²³ Tjokroaminoto, 1931:30.

Bentuk negara apa pun seperti republik, kerajaan, monarki, atau demokrasi tidak menjadi masalah bagi PSII selama di dalamnya terdapat dunia Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin²⁴. Pergerakan Darul Islam di Kabupaten Garut sangat kuat dan pada awal-awal berdiri sulit dibendung pengaruhnya. Penyebabnya adalah kebanyakan orang-orang yang bergabung dengan Darul Islam dulunya adalah anggota PSII, sehingga secara ideologi mereka sangat dekat karena sama-sama Islam, bahkan beberapa anggota Darul Islam adalah binaan dari Kyai-kyai PSII²⁵. Di beberapa tempat seperti Malangbong, Leles, Wanaraja, Limbangan, dan Sukawening yang menjadi basis PSII, juga menjadi basis Darul Islam. Menurut Ao (68 tahun) cucu dari K.H. Yusuf Taojiri bahwa banyak kader PSII yang pada saat siang hari mengikuti pendidikan politik di organisasi-organisasi sayap PSII seperti SEPMI, SEMMI, atau Pemuda Muslimin Indonesia, namun pada saat malam hari orang-orang tersebut banyak yang naik gunung untuk ikut bergerilya bersama para tentara Darul Islam.

Peristiwa penyerangan terhadap pesantren Darussalam pimpinan K.H. Yusuf Taojiri di Wanaraja pada tanggal 17 April 1952 membuat kaget banyak kalangan dan ini banyak disimpulkan oleh kalangan nasionalis dan komunis di Kabupaten Garut bahwa gerakan Darul Islam adalah gerakan berpaham takfiri²⁶. Paham takfiri ini sangat bertentangan dengan prinsip PSII yang dirumuskan sejak masa kepemimpinan Tjokroaminoto bahwa harus ada persatuan dalam ummat Islam. Namun, fakta lain adalah bahwa penyerangan terhadap K.H. Yusuf Taojiri tidak berarti sebuah penyerangan Darul Islam terhadap PSII yang memiliki sikap netral terhadap masalah Darul Islam. Bahkan, pihak PSII adalah mediator dalam mendamaikan dua kubu yang berseteru ini, sebab baik Kartosuwiryo atau pun K.H. Yusuf Taudjiri telah dikeluarkan dari PSII. Mereka berdua adalah sahabat baik yang dipisahkan oleh sikap politik. Kalau diperhatikan ada kemiripan nama antara Darul Islam dan Darussalam. Darussalam lahir ketika sikap K.H. Yusuf Taojiri tidak setuju terhadap sikap politik Kartosuwiryo yang ingin mendirikan Darul Islam. K.H.

²⁴ Wawancara dengan Ao (68 tahun)

²⁵ Wawancara dengan Ipin (56 Tahun)

²⁶ Takfiri adalah alat terhadap tuduhan seorang muslim bagi muslim lainnya tentang kekafiran.

Yusuf berpandangan bahwa membentuk sebuah negara Islam tidak serta merta bisa langsung mengubah tatanan yang ada. Tetapi harus pelan-pelan dimulai dari kehidupan di lingkungan masyarakat yang berduniakan Islam.

PSII memandang ada sebuah kekeliruan dalam gerakan yang dilakukan Darul Islam, sehingga meskipun sama-sama bernafaskan Islam, namun secara sikap kepartaian tidak pernah mendukung. Bahkan, dalam kurikulum pengkaderan atau pendidikan politik yang diselenggarakan PSII nantinya paham yang menjadi landasan gerak Darul Islam diluruskan dan disesuaikan dengan cita-cita dan tujuan organisasi. Kekeliruan tersebut adalah PSII memandang bahwa bentuk negara Indonesia tidak terlalu menjadi persoalan, sebab pada zaman Nabi Muhammad S.A.W. ketika melakukan kesepakatan dan perjanjian di Madinah tidak terjadi pendirian negara Islam seperti yang dicitakan Darul Islam, melainkan negara Madinah yang majemuk dengan berbagai suku, agama dan kabilah yang sedang berkembang. Kekeliruan selanjutnya adalah ketika wilayah Indonesia menyempit pasca perjanjian Renville. Pada saat itu Jawa Barat bukan lagi wilayah Republik Indonesia sehingga pemerintahan Indonesia beserta Tentara yang ada di wilayah Jawa Barat harus hijrah ke Yogyakarta. Kekosongan yang terjadi ini dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. PSII memandang bahwa proklamasi Darul Islam kurang tepat, sebab dilaksanakan diatas tanah sengketa yang masih diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia melalui jalur diplomasi.

Pengaruh gerakan Darul Islam yang menguat di masyarakat bukan hanya menjadi ancaman bagi organisasi-organisasi Islam yang resmi diakui negara seperti PSII, NU, atau Masyumi. Tetapi menjadi ancaman juga bagi PKI yang berideologikan komunisme. Pada tahun 1953 menjelang pemilihan umum 1955 di dalam Berita Indonesia menuliskan tentang kesiapan PKI untuk membantu melawan gerombolan Darul Islam dengan memberi hak kepada kaum buruh dan tani untuk angkat senjata. Akibatnya beberapa kali terjadi bentrokan antara Pemuda Rakyat sebagai badan otonom PKI dengan simpatisan Darul Islam²⁷.

²⁷ Wawancara dengan Apud (82 tahun)

PSII menanggapi konflik antara PKI dan Darul Islam adalah dengan sikap membuat pagar pembatas ideologi. Pagar pembatas ini didasarkan juga oleh bangkitnya semangat “jihad” di kalangan organisasi yang berideologikan Islam-Nasionalis seperti PSII, NU, Muhammadiyah, Persis, dan Masyumi. Semangat jihad yang diusung PSII teraktualisasi dalam gerak penolakan dan penentangan terhadap mereka yang berideologi komunisme di Indonesia seperti PKI dan Darul Islam dalam beberapa aspek. Untuk itu PSII sering melaksanakan pendidikan politik rutin dengan sasaran sayap-sayap organisasi kepemudaan seperti SEPMI, SEMMI, dan Pemuda Muslimin Indonesia untuk menyamakan persepsi dan kekuatan guna membendung penyebaran ideologi komunisme di Kabupaten Garut²⁸.

Gejolak politik yang dijelaskan pada uraian di atas sangat memengaruhi terhadap munculnya pilihan gerakan PSII berupa pendidikan politik dalam upaya membendung paham Darul Islam dan PKI di masyarakat Garut pada umumnya dan khususnya anggota PSII supaya lebih setia terhadap organisasi.

²⁸ *Op.cit*